

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEMUAN PEMERIKSAAN
BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
SULAWESI BARAT PERIODE 2020 – 2022**



DIAJUKAN OLEH:

ASA JASMINE HARIMURTI

126222069

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

JAKARTA

2023

LAPORAN TUGAS AKHIR

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEMUAN PEMERIKSAAN
BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
SULAWESI BARAT PERIODE 2020 – 2022**



DIAJUKAN OLEH:

ASA JASMINE HARIMURTI

126222069

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

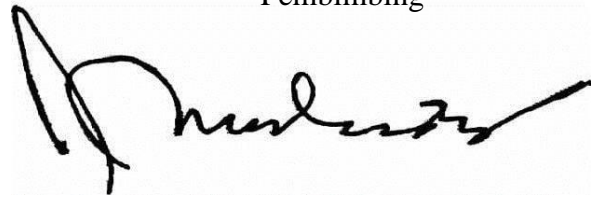
2023

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR

NAMA : Asa Jasmine Harimurti
NIM : 126222069
PROGRAM STUDI : Pendidikan Profesi Akuntan
JUDUL KARYA AKHIR : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Temuan
Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat
Periode 2020 s.d. 2022

Jakarta, 6 Oktober 2023
Pembimbing



(Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Ak., CACP., CPI., CA., CPA., ASEAN CPA)

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat, dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi jumlah temuan pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang diteliti pengaruhnya dalam menentukan jumlah temuan pemeriksaan BPK dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, pengadaan aset tetap, dan kompleksitas pemerintah daerah. Data yang digunakan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang diterbitkan BPK tahun 2020 s.d. 2022.

Kata kunci: temuan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan laporan keuangan, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK, pemerintah daerah

ABSTRACT

The Supreme Audit Agency (BPK) is the only institution authorized to carry out the task of examining the management and financial responsibility of the state / region in accordance with applicable laws and regulations. Central / local governments are required to submit their financial reports to BPK for examination as a form of responsibility to the people, in this case represented by the House of Representatives (DPR) / Regional People's Representative Council (DPRD). This study aims to determine the factors that influence the number of BPK audit findings on the Internal Control System (SPI) and compliance with applicable laws and regulations. Factors that are examined for their influence in determining the number of BPK audit findings in this study are the size of local government, the level of local wealth, fixed asset procurement, and the complexity of local government. The data used is the Audit Report (LHP) on the examination of regional financial statements in West Sulawesi Province issued by BPK from 2020 to 2022.

Keywords: audit findings, audit report, financial report audit, local government financial report (LKPD), BPK, local government

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya, tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Akuntan pada Program Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Selama proses penulisan tugas akhir ini, penulis tentunya mendapatkan banyak dukungan dan doa dari keluarga, kerabat, teman, serta para dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada:

1. Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Program Studi PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, serta dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengetahuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Seperti kata pepatah, *Tak Ada Gading yang Tak Retak*, demikian juga dengan tugas akhir ini yang tidak terlepas dari kekurangan. Akhir kata penulis memohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini.

Mamuju, 22 November 2022

Asa Jasmine Harimurti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1. Teori yang Mendasari	3
2.1.1. Teori Keagenan.....	3
2.1.2. Audit Sektor Publik.....	3
2.1.3. Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Temuan BPK	4
2.1.4. Ukuran daerah.....	4
2.1.5. Tingkat Kekayaan Daerah.....	5
2.1.6. Pengadaan Aset Tetap Daerah	5
2.1.7. Kompleksitas Daerah	5
2.2. Pengembangan Hipotesis	6
2.2.1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPD.....	6
2.2.2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPD.....	6
2.2.3. Pengaruh Pengadaan Aset Tetap Daerah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPD.....	7
2.2.4. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPD.....	8
2.2.5. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Pengadaan Aset Tetap Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK pada LKPD	8
2.3. Kerangka Penelitian	9
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1. Populasi, Sampel, dan Data Penelitian.....	10

3.2.	Operasional Variabel.....	10
3.2.1.	Variabel Dependen.....	10
3.2.2.	Variabel Independen	10
3.3.	Metode Analisis Data.....	12
3.3.1.	Statistik Deskriptif	12
3.3.2.	Analisis Regresi Data Panel.....	12
3.3.3.	Uji Model.....	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		16
4.1.	Deskripsi Data Penelitian.....	16
4.2.	Analisis Deskriptif	16
4.3.	Analisis Regresi Data Panel.....	17
4.3.1.	Tahap Estimasi Model	17
4.3.2.	Pemilihan model regresi data panel yang tepat.....	19
4.3.3.	Interpretasi Model.....	23
4.4.	Hasil Pengujian Hipotesis	26
BAB V		28
SIMPULAN		28
5.1.	Simpulan	28
5.2.	Keterbatasan.....	28
DAFTAR PUSTAKA		29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif.....	16
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Model Penelitian.....	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi awal perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan adanya pembagian kewenangan serta ketersediaan ruang publik yang memadai untuk memaknai kewenangan kepada unit pemerintah yang lebih rendah atau disebut pemerintah daerah (Hadi, 2005). Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan daerah tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah wajib mempertanggung jawabkan kewenangannya agar tetap sesuai dengan undang-undang yang ada dan agar tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan daerahnya, setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. LKPD tersebut wajib disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. BPK selaku auditor eksternal pemerintah daerah di Indonesia melakukan pemeriksaan atas LKPD, serta memberikan opini dan temuan hasil pemeriksaan atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang disusun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Indra, Iskak, dan Khaq (2022), auditor eksternal pemerintah berperan sebagai pihak ketiga dalam teori keagenan, yang mampu menjembatani perbedaan antara agen dan prinsipal dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

Berdasarkan hasil audit BPK tiga tahun terakhir, seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah total 7 entitas mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2020 s.d 2022. Meski mendapatkan opini WTP, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang dituangkan dalam temuan pemeriksaan. Menurut Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, Hery Ridwan mengungkapkan BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP, namun

pengelolaan keuangannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta perlu dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi permasalahan yang disampaikan oleh BPK.

Temuan pemeriksaan BPK bisa menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dikarenakan terdapat beberapa research gap dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, dimana dari beberapa penelitian ditemukan perbedaan hasil penelitian baik yang signifikan positif maupun negatif. Atas dasar hal tersebut peneliti termotivasi untuk menguji kembali determinan yang mempengaruhi jumlah temuan pemeriksaan LPKD di Sulawesi Barat. Ditinjau dari karakteristik pemerintah daerah yakni, ukuran pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengadaan aset tetap yang dilihat dari belanja modal, dan tingkat kompleksitas daerah yang dilihat dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pemerintah daerah.

Pemilihan populasi penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat dengan mengambil tahun pengamatan selama tiga tahun yakni 2020 s.d. 2022. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian diberi judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Periode 2020 s.d. 2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?
3. Apakah pengadaan aset tetap berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?
4. Apakah tingkat kompleksitas daerah berpengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, pengadaan aset tetap, dan tingkat kompleksitas daerah memiliki pengaruh terhadap temuan pemeriksaan BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan Halim, A.. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Akbar, B. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Teori. Jakarta: Bumi Metro Jaya
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Service, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005, Hal. 1
- Aushbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., dan Kinney Jr, W. R. 2007. The Discovery and Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-Mandated Audits. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 44:166-192
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. IHPS Semester I Tahun 2013. Diunduh tanggal 31 Agustus 2023. www.bpk.go.id
- Bonner, S.E., 1994. A Model of The Effects of Audit Task Complexity. *Accounting, Organizations, and Society*: V
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hadi, Syamsul. 2005. Pilkada Bima 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal di Indonesia. NTB: Bina Swagiri-Fitra Tuban-Solud
- Hartoyo, Nafsi. 2014. Optimalisasi Aset Negara/Daerah. Diunduh tanggal 31 Agustus 2023. www.bppk.depkeu.go.id
- Indra., Iskak, Jamaludin., Khaq, Akhsanul. 2022. Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*.131-143. DOI: 10.28986/jtaken.v8i2.935
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. BPF. Yogyakarta.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Stucture. *Journal of Financial Economics* 3; 305-360.

- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. UNNES. Accounting Analysis Journal.
- Martani, Dwi dan Annisa Lestari(2012). Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia. 2010 Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA) November 28 – December 1, 2010.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007”. Simposium Nasional Akuntansi 15. <<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>>
- Nalurita, N. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, dan Karakteristik Daerah terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
- Redaksi Sulbarexpress – Daerah (2023, 26 Mei). Mamuju, Polman, Majene dan Mamasa Raih Opini WTP, tapi Ada Catatan. *sulbarexpress.fajar.co.id*. Diambil dari: <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/05/26/mamuju-polman-majene-dan-mamasa-raih-opini-wtp-tapi-ada-catatan/>
- Sekaran, Uma. 2009. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba 4.
- Setiawan, Hadi. 2011. Kinerja Keuangan Daerah pada Era Otonomi. Dalam Risiko Fiskal Daerah. Era Adicitra Intermedia. Solo.
- Suhardjanto, D. Rusmin, Mandasari. Putriesti and Brown Alistair. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics : Evidence From Indonesian Municipalities. Jurnal Public Policy. Januari 2010.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi anggaran

Puspitasari, T. 2013. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Kompleksitas Pemda Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemda. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah

Widarjono. Agus. 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Ekonisia. Yogyakarta.